

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- Ali Said dan Lestyowati (ed), 2015 *Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicator*, Badan Pusat Statistik (BPS)., Jakarta.
- A. Pangerang Moenta, 2017, *Permasyarakatan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permasyarakatan*, Intelegensia Media, Malang
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII., Yogyakarta.
- Dadang Suwanda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA yang Responsif*, PT Remaja Rosdakarya., Bandung.
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara, Press., Malang
- HAW Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, PT Alumni., Bandung
- Herman, Syamsuddin Alimsyah, 2011 *Masih Ada Keberpihakan Pembelajaran Praktis DPRD Ditengah Ketidakpercayaan Publik*, Kopel, Makassar

Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, PT Grasindo., Jakarta.

Islamy dan Irfan, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta

Jimly assidiqie, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (jilid II), Jakarta; sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2005

_____ 2005, *Perihal Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjiseno, *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Penerbit Taujih., Madiun.

Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta

Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., Jakarta

_____ 2011, *Hukum Keuangan Negara*, edisi revisi, PT Rajagrafindo Persada., Jakarta

Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Edisi ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Paulus Effendi Lotulung, 1993 *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah* Bandung; Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Ryan Rasyid, 2007, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta.

Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara* cetakan ke-5, Liberty., Yogyakarta.

Titon Slamet Kurnia, dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,

Zulkarnaen, 2018, *Dinamika Sejarah Hukum Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum*, Pustaka Setia., Bandung

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perppu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam UU No 2 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Permendagri No 39 tahun 2020 tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan penggunaan APBD

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Artikel Majalah Ilmiah

Afrah Junita, 2015, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah*", Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol.4, Nomor 2, November 2015

Muhammad Junaidi,dkk, “*Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*”, Universitas Halu oleo, Halu Oleo Law Review Vol.4 No 2, September 2020

Syofyan Hadi, *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Edisi Januari-Juni 2014

Tesis

Andi Amda, 2007, ” *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Tesis, Magister Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ivan Budi Hartanto, 2011, “ *Pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah di bidang anggaran*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Disertasi

Naswar, 2020 *Rekonstruksi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar

Surat Kabar/Media Online

<https://batarapos.com/berikut-realisisi-dan-sisa-anggaran-penanganan-covid-19-dinkes-luwu-timur-dan-17-puskesmas/>

<https://dosenbahasa.com/jenis-jenis-imbuhan-asing>

<https://fajar.co.id/2020/05/12/pimpinan-dprd-kota-makassar-dukung-penuh-pembentukan-pansus-covid-19/2/>

<https://kbbi.web.id/implikasi>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508164219-532-501405/menkeu-ancam-tunda-dau-65-daerah-yang-belum-revisi-apbd>

<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/27214/93-persen-daerah-telah-melakukan-refocusing-dan-relokasi-apbd-untuk-tangani-covid19>

<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/27293/total-dana-di-apbd-yang-telah-direalokasi-untuk-covid-19-mencapai-5657-triliun>

<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-banten-gelar-dialog-pengawasan-penanganan-covid-19-di-provinsi-banten>

<https://www.sederet.com/tutorial/tip-toefl-mengenal-prefixes-dalam-tes-toefl-out-dan-re/>